

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2001 merupakan suatu solusi alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia yang terlihat dari luas wilayah serta luasnya cakupan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan daerah menyebabkan kinerja dari pemerintah pusat menjadi tidak efektif mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk, keberagaman dan kompleksitas dari kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah akan berdampak pada pemberian kewenangan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan dari masyarakat di daerah tersebut. Maksud dari penjelasan tersebut juga dapat dipahami sebagai wujud desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diharapkan dengan pemberian otonomi daerah tersebut daerah dalam lebih mudah untuk melakukan pembangunan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya karena pemerintah daerah di rasa lebih mengetahui dan peka terhadap kebutuhan dari masyarakatnya.

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh adanya faktor finansial/keuangan. Untuk itu pemerintah pusat memberikan dana perimbangan untuk daerah sebagai tanggung jawab pemerintah pusat untuk tidak langsung lepas tangan terhadap urusan pemerintah daerah. Pemberian dana perimbangan tersebut sebagai wujud pemenuhan desentralisasi fiskal untuk pemerintah daerah. Melalui UU No 25 Tahun 1999 yang kemudian

diperbarui menjadi UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Tanpa terkecuali pemberian dana perimbangan kepada pemerintahan desa.

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan masyarakat masyarakat. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma perubahan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi. Setelah diterbitkan UU No. 6 tahun 2014, desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur perkembangan desa. Dengan kata lain, penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan yang sehat (sintia, 2019).

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkata pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju Pembangunan Daerah serta Laju Pertumbuhan Desa dan Kabupaten/Kota semakin seimbang. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju ke desentralisasi menyebabkan terbukanya suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri

sesuai dengan karakteristik masing-masing suatu daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelancaran pembangunan nasional diawali dari pembangunan ditingkat yang paling bawah yaitu pembangunan desa. Namun pada pelaksanaan pembangunan nasional masih ada beberapa masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan ekonomi antara desa dan kota di Indonesia. Berdasarkan pernyataan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) bahwa belum meratanya pertumbuhan ekonomi karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur, ketimpangan kualitas SDM, dan ketimpangan sumber energi yang masih terpusat. Tidak meratanya pembangunan akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 dibagi menjadi dua yaitu, angka kemiskinan penduduk di kota sebesar 8.60% sedangkan angka kemiskinan penduduk di pedesaan sebesar 14.70%. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Menurut survei penduduk Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Sulawesi pada 2019 mencapai 19,56 juta jiwa atau 7,33% dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut terdiri atas 9,74 juta jiwa laki-laki dan 9,82 juta jiwa

perempuan. Penyaluran dana desa di Sulawesi selatan sampai dengan 31 Agustus 2021 telah mencapai Rp 1,54 triliun atau 64,7% dari pagu Rp 2,37 triliun. Hal ini berdasarkan data masyarakat umum dan pemerintah daerah untuk memantau dana desa. Kepala Dikretorat Jendral perbendaharaan Sulawesi, meski mengalami perlambatan di banding tahun sebelumnya, realisasi dana desa Sulsel masih lebih baik dari rata-rata nasional yang berada pada angka 60,74% dari alokasi yang disediakan (Anon, 2020).

Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut (Nugroho, 2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan. Selanjutnya, (Ramdhani, 2017) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi Desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparat pemerintah desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang *bussiness process*-nya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah. Padahal menurut Edward III (Nugroho, 2014) bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup menjadi faktor untuk membawa kebijakan publik yang efektif. Menurut John P. (2015) juga berpendapat bahwa lemahnya sumberdaya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa. Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri (Iskandar, 2016) sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan Desa (Fahri, 2014).

Dalam hal ini pemberdayaan pembangunan yang dilaksanakan di Lamasi yaitu dengan pembuatan bendungan daerah irigasi Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur. Aliran irigasi inilah yang menyediakan pasokan air untuk mengairi area persawahan masyarakat Lamasi dan Lamasi Timur dengan luas potensial 4,782 Ha yang mengairi 19 Desa yaitu: Padang Kalua, Pongsamelung, Awo Gading, Lamasi, Lamasi 1, Salujambu, Se'pon, Setiarejo, To'pongo, Wiwitan, Seriti,

Pelalan, To'lemo, Salupao, Bululondong, Pompengan, Pompengan Tengah, Pompengan Utara (Nurhanisa 2018).

Fungsi dari bendungan yaitu untuk mengairi area persawahan dan juga sebagai alat untuk mengukur debit air. Dampak dari pembangunan bendungan Lamasi yaitu meningkatkan hasil produksi pertanian bagi petani. Disamping itu dengan adanya bendungan Lamasi beserta jaringan irigasinya terjadi pengalihan fungsi dari yang dulunya digunakan sebagai lahan kurang produktif seperti hutan dan perkebunan, menjadi lahan yang produktif seperti persawahan (Nurhanisa, 2018)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas kinerja pengolahan dana desa dalam pemberdayaan pembangunan di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas kinerja pengolahan dana desa dalam pemberdayaan pembangunan di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang efektifitas kinerja pengolahan dana desa dalam pemberdayaan pembangunan di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadikan bahan tinjauan untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pengelohan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. sumber daya manusia (SDM) aparatur peningkatan kualitas sangat penting tentu akan berdampak pada efektivitas tata kelola pemerintah desa. Namun karena keterbatasan waktu serta pengetahuan penelitian sehingga dalam penelitian ini penelitian hanya akan membahas tentang efektivitas kinerja pengelohan dana desa dalam pemberdayaan pembangunan di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Mingkid Jonathan, 2017). Mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- a) Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai.
- b) Ketetapan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan.
- c) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program dan hasil sesuai harapan masyarakat.

Menurut Mardiasmo Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat

dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karna adanya proses kegiatan.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah di tentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang di kutip Handayani (1994 : 16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. ” Lebih lanjut menurut Kurniawan (2005 : 109) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik, mendefenisikan efektivitas, sebagai berikut : “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah di tentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kuantitas, Kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk

menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumberdaya meliputi ketersediaan personil, sasaran dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55) yakni : Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan Proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan Sasaran (goalsapproach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Dengan demikian untuk

menganalisis efektivitas dana desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target belanja}} \times 100\%$$

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan Desa. Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri sehingga penyusunan Rencana Pembangunan.Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan Desa.

2.1.3 Kinerja

Pada dasarnya kinerja memiliki arti yang banyak berdasarkan sudut pandang atau pendapat para ahli. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau dari kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma maupun etika. Kinerja ialah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya". Menyebutkan bahwa kinerja merupakan singkatan dari kinetika *energy* kerja yang pada dalam bahasa inggris adalah *performance*. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh

fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu (Wahdani, 2021).

Dengan begitu ada beberapa yang perlu diketahui seperti tentang penilaian kinerja pegawai atau aparatur desa, mulai dari mengevaluasi kinerja, keterampilan, kemampuan, pencapaian serta pertumbuhan seorang pegawai. Penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan profesional sehingga akan meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Karakteristik pegawai juga perlu diketahui dalam hal ini seperti mampu bertanggung jawab, berani mengambil keputusan dan resiko, memiliki tujuan yang realitis, memiliki rencana kerja menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan program-program kerja yang ada didesa.

Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan mengukur kinerja aparatur desa, konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima organisasi

publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implicit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Akuntabilitas publik menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak (Wahdani, 2021).

2.2 Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Menurut peraturan menteri keuangan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi

desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari dana desa juga meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan desa (Dewi and Andayani, 2022).

Desa adalah asosiasi antar kegiatan sekelompok orang dengan wilayahnya. Pandangan dari asosiasi tersebut merupakan suatu wujud dan penampilan di dunia yang ditimbulkan dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan politik serta cultural yang saling bergantung antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan public dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat local. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Disamping itu, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan perangkat desa. (Ashari, 2021)

Dana Desa diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang- Undang No. 6 Tahun 2014,

pembangunan yang dimaksud adalah upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Adapun Tujuan dilaksanakannya Program Dana Desa itu sendiri (dengan landasan Hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014), adalah Meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.2.2 Penggunaan Dana Desa

Dalam hal ini penggunaan dana desa adalah keadilan yang mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Kewenangan Desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat dan berbasis sumber daya Desa adalah pelaksanaan secara pemberdayaan mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal. Tipologi Desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan

karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas dalam penggunaan dana Desa juga seperti penggunaan dana Desa untuk bidang pembangunan Desa. Sebagai sarana prasarana Desa terdiri dari lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah. Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa dan tambatan perahu. Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel dan jaringan distribusi tenaga listrik. Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum dan website Desa. sarana prasarana sosial pelayanan dasar terdiri dari: kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu dan polindes. Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan Desa.

Kemudian dalam sarana prasarana usaha ekonomi Desa terdiri dari usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung Desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak. Usaha ekonomi pertanian atau yang lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung Desa, *cold storage*, pasar Desa, pondok wisata, penggilingan padi dan peralatan bengkel kendaraan bermotor. sarana prasarana pelestarian dalam lingkungan hidup dimulai dari kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya, pelestarian lingkungan hidup, sarana prasarana lainnya. Penggunaan dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa. Pengembangan ketahanan masyarakat desa. Pengembangan sistem informasi Desa. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha produktif yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ketetapan dalam musyawarah desa.

2.2.3 Pengelohana Dana Desa

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang (UU) desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa atau

sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut (Neny et al. 2017) asas-asas pengelolaan keuangan desa :

- Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
- Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berbagai prinsip atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa, agar dana yang sangat terbatas tersebut dapat digunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Efektif artinya pengelolaan keuangan yang dimaksud dapat menghasilkan perbandingan yang terbaik antara input dan output.

2.2.4 Pemberdayaan dan Pembangunan Desa

Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan Desa. Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan potensi yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan desa. Rencana penyelenggaraan pemerintah Desa berisi pemberdayaan untuk masyarakat yang berisi tentang evaluasi rencana kerja dengan prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi dengan membangkitkan potensi yang ada dalam individu maupun kelompok yang memberikan dorongan dan kesadaran diri. (Hulu, Harahap, and Nasution, 2018).

Kapasitas pemerintah desa perlu ditingkatkan melalui program pemberdayaan aparatur desa untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan desa, termasuk pemberdayaan masyarakat desa. pemerintah dan tim pengelola ADD perlu di tingkatkan melalui pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat dan penggunaan dana operasional pemberdayaan masyarakat dan penggunaan dana operasional pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD perlu di tingkatkan agar mampu melayani kelompok masyarakat yang berminat untuk membuka usaha ekonomi produktif di berbagai bidang usaha.

Pemberdayaan pembangunan merupakan perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, proses ini dapat dilengkapi

pula dengan membangun Desa secara fisik atau pun membantu secara nonfisik, dilihat dari survei atau kebutuhan masyarakat (Risna, 2015).

2.2.5 Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemberdayaan dalam Pembangunan Desa

Sosial/masyarakat tipe masyarakat yang ada di desa ini sebagian memang acuh tak acuh atau kurang punya inisiatif untuk membangun desanya, sehingga hal ini juga menghambat terhadap pembangunan Desa. Pemerintah dalam konteks pemerintahan yang berkaitan dengan Desa, baik dari pemerintah pusat (kemedes), Pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah mempunyai cukup strategis untuk mengatur dan mengelola masa depan desa di wilayahnya. Salah satu cara yang paling utama dalam konsistensi serta fokus dalam pembedahan Desa yang diurus, sehingga fokus pendampingan tersebut menjadi terpecah-pecah dengan Desa lain. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan perlu di tetapkan sasaran dan strategi serta arah kebijakan program pemberdayaan sehingga apa yang menjadi tujuan dan program dari pemerintah bisa efektif.

Sumber daya manusia (SDM) aparatur peningkatan kualitas sangat penting tentu akan berdampak efektifitas tata kelola pemerintah Desa begitu pula dalam mengelola dana Desa yang digelontorkan pemerintah yang terus bertambah setiap tahunnya. Sumber daya manusia memiliki faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subyek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

Kepuasan atau ketidakpuasan dari masyarakat ditentukan oleh persepsi dan harapan masyarakat. Persepsi terhadap suatu produk atau pelayanan sendiri dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat saat menerima suatu produk atau menerima suatu pelayanan. Kepuasan masyarakat terhadap pemberian bantuan dari pemerintah desa masih belum dapat dikatakan berhasil karena masih ada masyarakat yang belum merasa puas dengan pembagian bantuan yang pemerintah berikan kepada masyarakat. Tingkat input, yakni masukan yang berkaitan dengan aspek-aspek sebelum Program Pemberdayaan dilaksanakan, yang diukur dari indikator pelaksanaan program, tingkat ketepatan sasaran, dan pencapaian tujuan program. Tingkat output, yakni keluaran yang mengindikasikan hasil dari pelaksanaan Program pemberdayaan, yang diukur dari penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan, dan pencapaian tujuan dengan begitu pemberian bantuan dari pemerintah desa kepada masyarakat sudah bisa dikatakan efektif karena sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang masih belum puas dengan hasil dari pembagian bantuan oleh pemerintah desa tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu menjadi referensi dari penelitian ini. Di bawah ini ada beberapa penelitian yang terkait dan sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti sekarang, di antaranya yang tercantum dalam tabel 2.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Humaniora 2017)	Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo	Efektifitas dana desa (X1) pengembangan potensi ekonomi (X2) Partisipasi masyarakat (Y)	Penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dana desa berpengaruh signifikan pada pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat
2	(Istiqomah 2015)	Efektivitas kinerja badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa ringintunggal kec. gayam kab. bojonegoro tahun 2013	kinerja badan permusyawaratan desa (X) dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)	Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari ke tiga fungsinya baik itu legislasi, anggaran dan pengawasan yang masih kurang.
3	(Widiyarta 2018)	Efektivitas tenaga pendamping professional dalam pemanfaatan dana desa guna mendorong pemberdayaan	Tenaga pendamping professional (X1) pemanfaatan dana desa (X2) pemberdayaan masyarakat desa	Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Tenaga pendamping professional menunjukkan

		masyarakat desa	(Y)	bahwa kinerja pendamping kurang maksimal terbukti bahwa peran pendamping desa
4	(Maimunah 2021)	Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa (studi di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang	Kinerja Pendamping Lokal Desa (X) Pembangunan Desa (Y)	Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja penadamping local desa berpengaruh signifikan terhadapp pembangunan desa.
5	(Maimunah, Affifuddin, and Suyeno 2021)	Efektifitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang)	Kinerja Pendamping Lokal Desa (X) Pembangunan desa (Y)	Penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kinerja pendamping lokal desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa
6.	(Rochani, Sudarmiani, and ... 2020)	Pengaruh Efektivitas Kinerja Aparatur Desa dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Publik di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	Kinerja aparatur desa (X1) Pengelolaan dana desa (X2) Kepuasan public (Y)	Penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dan efektivitas kinerja dan pengelolaan dana desaterhadap kepuasan publik. Diharapkan pemerintah desa dan instansi terkait

				untuk terus meningkatkan efektivitas kinerja desa.
7.	(Mingkid jonathan 2017)	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	Penggunaan dana desa (X) Peningkatan pebangunan (Y)	Pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sudah tercapai disebabkan pemerintah konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa.
8.	(Aryani, Werastuti, and Adiputra 2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparatur (X1) Pemerintah desa (X2) Efektifitas kinerja pendamping lokal desa (X3) Keterlibatan masyarakat (X4) Pengoptimalan pengelolaan dana desa (Y)	Penelitian menunjukan bahwa: 1. Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintaha desa Kabupaten

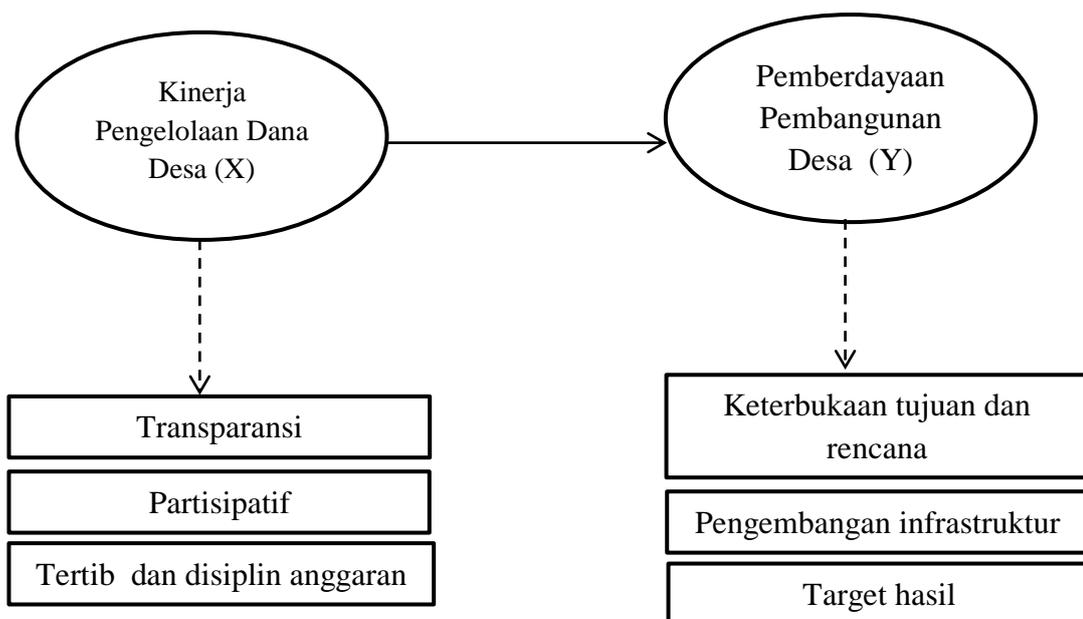
				Buleleng. 2 desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng.
9.	(Wahdani 2021)	Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa	Kinerja aparatur desa (X) Pengelolaan dana desa (Y)	Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur desa masih harus melakukan perbaikan demi terciptanya kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa tersebut.
10.	(Bilote Noferyly 2020)	Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung	Lembaga pemberdayaan masyarakat (X) Pengelolaan dan kelurahan (Y)	penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja LPMK dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Lembeh Utara belum efektif seutuhnya kepuasan.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada diatas, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dalam merumuskan tentang efektivitas kinerja pengelohan dana desa dalam pemberdayaan pembangunan di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.6 Hipotesis

Hipotesis secara sederhana merupakan dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang di peroleh. Menurut (Sugiyono, 2018), hipotesis penelitian adalah jawaban sementara berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan

teori. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dibuat oleh penulis berbentuk pernyataan, hipotesis yang masih bersifat tentatif perlu diuji kembali melalui serangkaian penelitian. Maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga efektivitas kinerja pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan dalam pemberdayaan pembangunan di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Penelitian kuantitatif menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan terhitung dari bulan April sampai pada bulan Juni 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

Salah satu bagian dalam desain penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Penentuan populasi dan sampel penelitian menjadi sangat penting. Karena hasil penelitian akan mengambil kesimpulan secara luas (generalisasi hasil penelitian). Ketepatan dan keakuratan dalam penentuan

populasi dan sampel penelitian akan memberikan bobot dengan kualitas hasil penelitian.

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam efektivitas kinerja pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan pembangunan yang ada di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu. Desa yang ada di Kecamatan Lamasi yaitu Padang Kalua, Wiwitan, Wiwitan Timur, Se'pon, Pongsamelung, To'pongo, Awo Gading, Setiarejo dan Salujambu.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menyebar sejumlah kuesioner dan pengambilan sampel didasarkan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah kisaran 50 aparat desa dari populasi dengan pertimbangan jumlah tersebut sudah mencerminkan ukuran sampel yang benar. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian informasi yang digunakan merupakan informasi yang bersifat kuantitatif sebab dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya.

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden. Kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilah jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Data primer dalam penelitian ini dari angket atau kuesioner yang dibagikan kepada responden (Sugiyono, 2018).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang fungsinya adalah menggali informasi. Dalam hal ini kuesioner merupakan teknik yang paling banyak memberikan data.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional menjelaskan bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel yang diteliti dengan menemukannya secara singkat dan jelas. Berikut adalah definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian.

3.6.1 Variabel Bebas atau Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Kinerja Pengelolaan Dana Desa (X).

Kinerja pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

3.6.2 Variabel Terikat atau Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen adalah Pemberdayaan Pembangunan Desa (Y).

Pemberdayaan pembangunan desa yaitu mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong dan mendampingi terciptanya kader-kader pembangunan desa secara partisipatif.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti yang berisi beberapa item pertanyaan tentang permasalahan yang berkaitan dengan efektifitas kinerja pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan pembangunan desa. Instrument dalam penelitian ini menggunakan *Skala Likert* yang disajikan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Sangat Setuju | diberi nilai 5 |
| 2. Setuju | diberi nilai 4 |
| 3. Netral | diberi nilai 3 |
| 4. Tidak Setuju | diberi nilai 2 |
| 5. Sangat Tidak Setuju | diberi nilai 1 |

3.8 Analisis Data

Teknik Analisis data adalah berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2018). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.8.1 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menghasilkan data

yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item masing-masing pertanyaan dengan skor pertanyaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Package for Social Science)*. Pengujian validitas memiliki kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk $< 0,05$ atau jika r hitung lebih besar dari r tabel (pada taraf signifikansi 0,05), maka butir pernyataan atau indikator tersebut dikatakan “valid” dan sebaliknya.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang

memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,60 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.

3.8.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi Linier Sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/*predictor* (X) dengan satu variabel tak bebas/*response* (Y).

Adapun model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana:

Y = Pemberdayaan pembangunan desa

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Kinerja pengelolaan dana desa

e = *Standart error*

3.8.3 Uji Hipotesis

Uji statistik digunakan untuk melihat ketepatan atau keakuratan dari suatu fungsi atau persamaan untuk menaksir dari data yang kita analisis. Nilai ketepatan ini dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Dapat dilihat dari nilai t hitung, F hitung dan nilai determinasinya. melalui analisis regresi, kemudian diuji kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kemudian diinterpretasikan hasilnya. Kemudian pengambilan keputusan atas hipotesis dapat dilihat dari nilai profitabilitas signifikan dari masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi menggunakan SPSS jika angka signifikan $\alpha < (0,05)$ maka

dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian dalam penelitian ini menurut (Ghozali, 2018): a) Apabila $t_{sig} <$ dari 0,05 dan $t_{hitung} >$ tabel, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. b) Apabila $t_{sig} >$ dari 0,05 dan $t_{hitung} <$ tabel, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.9 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS type 22 yang menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk jenis penelitian kuantitatif. SPSS itu sendiri merupakan program komputer yang banyak digunakan untuk mengolah data statistik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak dan Luas Wilayah

Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Luwu, Kecamatan Lamasi merujuk pada visi Kabupaten Luwu tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 yaitu: “Kabupaten Luwu yang maju, sejahtera dan mandiri dalam nuansa religi”. Untuk terwujudnya visi tersebut, misi yang diemban Kecamatan Lamasi adalah misi pertama yaitu, “mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.

Maka dengan ini berdasarkan keadaan geografis, Kecamatan Lamasi terletak bagian Utara Kabupaten Luwu dengan Ibu Kota Lamasi dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walendrang Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lamasi sebelah barat dan berbatasan dengan Kecamatan Walendrang. Luas wilayah Kecamatan Lamasi 42.38 km² yang dihuni 22.885 jiwa yang terdiri dari 11.029 laki-laki dan 11.834 perempuan, dengan jumlah 6239 kepala keluarga dan 5500 rumah tangga yang terdiri dari beberapa etnis yaitu: Bugis, Jawa, Toraja dan etnis lainnya dengan mata pencaharian sebagian besar bertani.

Struktur pemerintahan di wilayah Kecamatan Lamasi hingga 2021 terdiri atas 9 Desa dan 1 Kelurahan dengan 40 Dusun, 8 RW dan 94 RT sedangkan unit kerja SKPD Kabupaten yang ada yaitu: Puskesmas, BPP, dan Koord, daerah irigasi Lamasi kiri, balai benih perikanan dan penyuluhan lapangan keluarga

berencana. Sementara untuk instansi vertikal yang ada yakni polsek dan kementerian urusan agama.

Potensi sumber daya alam Kecamatan Lamasi adalah pertanian, dimana luas persawahan sekitar 2.780 Ha, area perkebunan sekitaar 1.303 Ha lahan terbesar di Kabupaten. Selain dari itu terdapat pula potensi bahan pasir dan bantuan yang terdapat di sepanjang sungai Lamasi (DAS Saddang) dan sungai Makawa (DAS Rongkong). Untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia, maka Kecamatan Lamasi telah dilengkapi sarana pendidikan mulai dari TK sampai SMA/SMK yakni SMA/SMK.7 SMP.14 SD dan 12 TK. Sementara di sektoer kesehatan terdapat sarana puskesmas 1, pustu 1, poskedes 6 unit dan posyandu 24 unit.Selain itu dari pada itu terdapat pula sarana peribadaan yang terdiri dari 46 masjid dan 25 gereja. Lembaga-lembaga di bidang perekonomian dan keuangan yang ada saat ini bank, koperasi, pengadaian, pos dan giro, pasar sentaral, asuransi pembayaran dan jasa keuangan lainnya.

Table 4.1 klasifikasi data penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020

No	Desa	Laki –laki	Perempuan	Jumlah
1.	Padang Kalua	1.324	1.060	2.384
2.	Wiwitan	1.409	1.515	2.924
3.	Wiwitan Timur	1.370	1.299	2.699
4.	Se'pon	859	865	1.724
5.	Setiarejo	1.577	1.502	3.079
6.	Salujambu	868	896	1.764
7.	Awo'Gading	749	881	1.560
8.	Pongsamelung	1.124	1.226	2.460
9.	To'pongo	1.234	1.226	2.460

sumber : data penduduk desa 2020

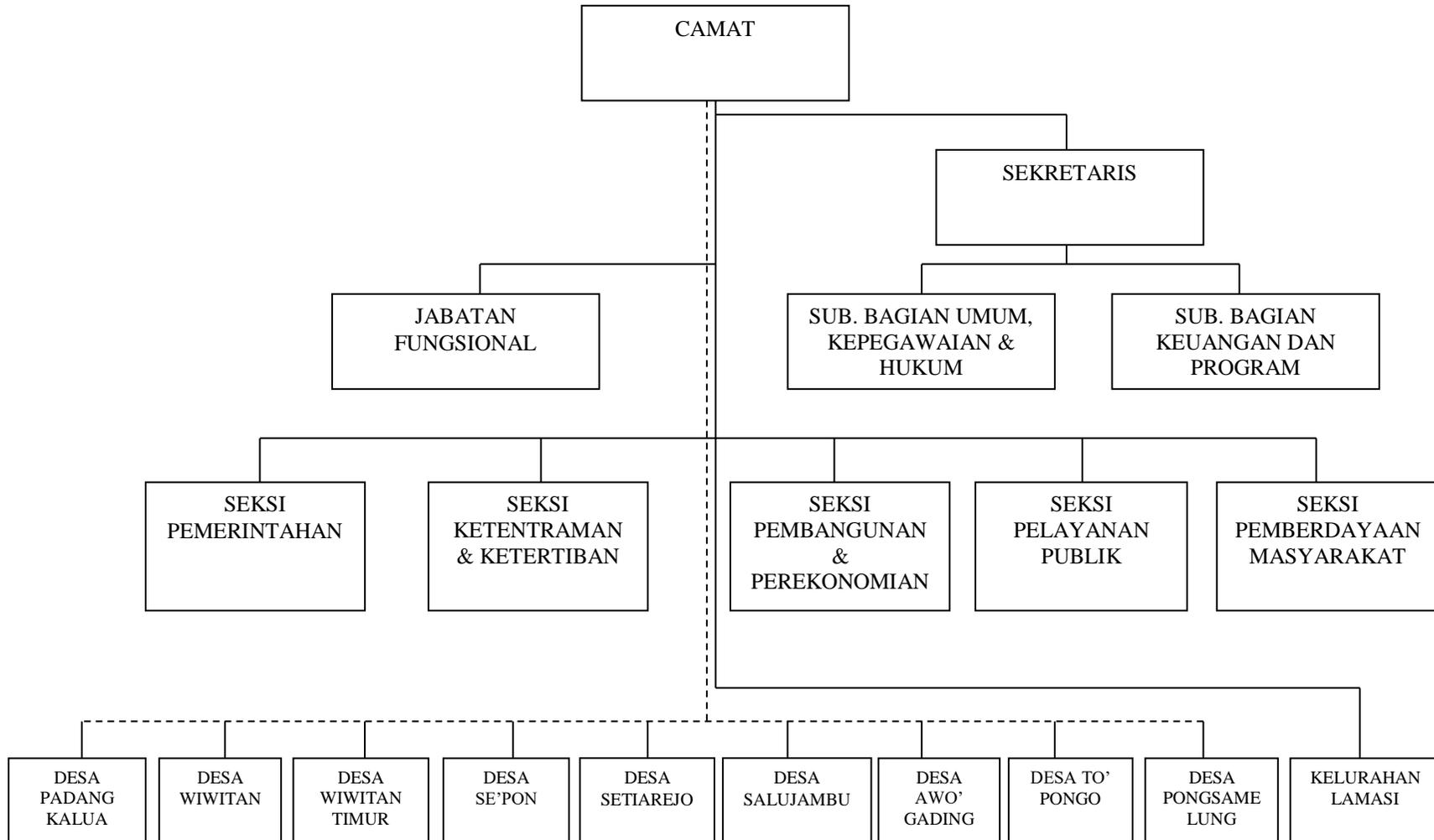
4.1.2 Struktur Organisasi

Pemerintah di Kecamatan Lamasi dalam menjelaskan tugas-tugas ke pemerintahannya, maka diperlukan suatu koordinasi kegiatan tugas diantara masing-masing pegawai yang mencerminkan aktivitas tertentu yang mencakup hubungan antara masing-masing bagian. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian atau departemen, maka semakin kompleks pula hubungan yang ada diantara pegawai sehingga masing-masing pegawai mengetahui tanggung jawabnya, struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memberikan gambaran hubungan antara satu bagian dengan bagian lain dalam suatu unit organisasi atau perusahaan secara keseluruhan di mulai dari tingkat tinggi sampai dengan terendah dalam unit organisasi tersebut.

Bentuk struktur organisasi adalah sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi karena struktur organisasi yang jelas akan dapat memberikan gambaran yang baik dalam menentukan setiap tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki pada bagian yang lainnya.

Struktur organisasi pada Kecamatan Lamasi dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lamasi



4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi

Efektivitas dalam kinerja membangun desa dilihat dari pencapaian tujuan bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai, mengetahui ketetapan waktu atau target proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan dan sesuai kebutuhan atau manfaat dana desa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program dan hasil sesuai harapan masyarakat (Mingkid jonathan, 2017).

Proses pembangunan mulai dari fisik maupun nonfisik yang sudah terealisasi di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu yaitu :

- a. Dampak covid yang terjadi membuat aktivitas warga menjadi terbatas dan berpengaruh terhadap pendapatan masing-masing. Dengan ini ada bentuk bantuan secara nonfisik yaitu BLT (bantuan langsung tunai) menggunakan dana desa yang sudah terlaksana 2 tahun yang lalu hingga saat ini.
- b. Pembangunan dari dana pusat yaitu program yang sudah dijalankan 3 tahun terakhir yaitu pembangunan rumah tidak layak atau bedah rumah
- c. Pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya seperti : drainase atau parit, jembatan di masing-masing desa, jalan tani, talu atau pinggiran

jembatan, pengeras jalan, normalisasi sungai, rabat beto jalan, air bersih atau sari tasi, pembuatan jamban, jalan penghubung antar Desa.

4.2.2 Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah aparat yang bekerja pada Kantor Desa Kecamatan Lamasi Kab. Luwu. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada seluruh kantor desa yang berada di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu sebanyak 50 eksamplernya dan diberikan kepada aparat kantor desa Kecamatan Lamasi Kab. Luwu yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 44 eksamplernya.

Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Pengumpulan Data Primer Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Distribusi kuesioner	50
2	Kuesioner kembali	44
3	Kuesioner cacat/tidak kembali	6
4	Kuesioner yang dapat diolah	$44/50 \times 100\% = 0,88$

Sumber : Data Primer yang diolah (2022)

4.2.1 Uji Validitas

Hasil pengujian validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun valid, maka perlu diuji dengan korelasi antara skor (nilai) tiap – tiap item pernyataan dengan total skor kuesioner tersebut. Pada nilai pearson correlation, apabila koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,297 maka indikator

tersebut dikatakan valid. Berikut disajikan data validitas dari masing-masing variabel .

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa (X)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan X1	0,610	0,297	Valid
Pernyataan X2	0,833	0,297	Valid
Pernyataan X3	0,823	0,297	Valid
Pernyataan X4	0,499	0,297	Valid
Pernyataan X5	0,712	0,297	Valid
Pernyataan X6	0,766	0,297	Valid
Pernyataan X7	0,766	0,297	Valid
Pernyataan X8	0,723	0,297	Valid
Pernyataan X9	0,792	0,297	Valid
Pernyataan X10	0,791	0,297	Valid
Pernyataan Y1	0,605	0,297	Valid
Pernyataan Y2	0,596	0,297	Valid
Pernyataan Y3	0,639	0,297	Valid
Pernyataan Y4	0,700	0,297	Valid
Pernyataan Y5	0,687	0,297	Valid
Pernyataan Y6	0,639	0,297	Valid
Pernyataan Y7	0,684	0,297	Valid
Pernyataan Y8	0,709	0,297	Valid
Pernyataan Y9	0,697	0,297	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan data tersebut pada table diatas nilai R table diperoleh adalah 0,297. Item pernyataan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana (X) dan Dalam Pemberdayaan Pembangunan Di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu menunjukkan bahwa semua item pernyataan dapat digunakan karena nilai R hitung lebih besar dari pada nilai R table, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat valid.

4.2.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikasi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,60 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	r _{tabel}	Keterangan
Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa	0,891	0,60	0,297	Reliabel
Pemberdayaan Pembangunan Di Kecamatan Lamasi	0,838	0,60	0,297	Reliabel

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Dari tabel diatas hasil pengujian reliabilitas menunjukkan variabel Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa (X) dalam Pemberdayaan Pembangunan (Y), memiliki *cronbach alpha* > 0,60 hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Metode analisis data yang digunakan yaitu anahylisis regresi sederhana dengan bantuan SPSS. Analisis regresi linear sederhana merupakan hubungan antara dua variabel yaitu bebas (variabel independen) dan variable tak bebas (variabel dependen). Maka dari itu penelitian menyajikan hasil dari uji regresi linear sederhana berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.5 Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,313	4,040		1,068	,292
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA	,790	,088	,810	8,949	,000

a. Dependent Variable: PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DESA

Regresi linear sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu pengubah yang dihubungkan dengan satu pengubah tidak bebas. Bentuk umum dari persamaan regresi linear untuk populasi adalah $Y = a + b X$

Pada *output* ini, dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam kasus ini, persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah :

$$Y = a + b X$$

$$Y = 4,313 + 0,790 X$$

Dimana :

Y = Pemberdayaan Pembangunan Di Kecamatan Lamasi

X = Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Dari *output* didapatkan model persamaan regresi :

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana diatas dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 4,313 menunjukkan bahwa jika variabel Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan Pemberdayaan Pembangunan Di Kecamatan Lamasi sebesar 0,790 satuan atau sebesar 79,0%.

4.2.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien uji determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa mampu menjelaskan variabel dependen Pemberdayaan Pembangunan Di Kecamatan. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,810 ^a	,656	,648	2,27503

a. Predictors: (Constant), EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dinyatakan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,810. Hal ini membuktikan bahwa Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Pembangunan Di Kecamatan Lamasi sesuai dengan interval koefisien yaitu Uji R *square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan secara simultan variabel Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Pembangunan Di Kecamatan Lamasi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R *square*. Hasil Uji R *square* dapat dilihat pada tabel 4.6 diketahui bahwa bahwa nilai R *square* adalah sebesar 0,656. Hal ini berrati bahwa sebesar 65,6% variabel dependen atau Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pemberdayaan Pembangunan Di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,313	4,040		1,068	,292
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA	,790	,088	,810	8,949	,000

a. Dependent Variable: PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DESA

Efektifitas kinerja pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan pembangunan di Kecamatan Lamasi.

Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi linier sederhana pada variabel efektifitas kinerja pengelolaan dana desa. Efektifitas kinerja pengelolaan dana desa memiliki nilai koefisien sebesar 0,790 sedangkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas kinerja pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan pembangunan desa. Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana diatas dengan nilai *Beta* sebesar 0,810 dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 4,313 menunjukkan bahwa jika variabel efektifitas pengelolaan dana desa bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan pemberdayaan pembangunan desa sebesar 4,313 satuan variabel efektifitas pengelolaan dana desa 0,810 menunjukkan bahwa jika variabel efektifitas

pengelolaan dana desa meningkat satu satuan maka akan meningkatkan pemberdayaan pembangunan sebesar 0,810 satuan atau sebesar 81,0%.

Sedangkan nilai *R square* adalah sebesar 0,656. Hal ini berarti bahwa sebesar 65,6% variabel dependen atau pemberdayaan pembangunan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu, efektifitas pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya yaitu sebesar 34,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pemberdayaan pembangunan.

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu pemberdayaan pembangunan dan variabel independen yaitu efektifitas pengelolaan dana desa, sebagai berikut : Hasil uji hipotesis H_1 diterima yang berbunyi efektifitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan pembangunan di Kecamatan Lamasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan maimunah, affifuddin dan suyeno yang berjudul efektivitas kinerja pendamping lokal desa dalam pembangunan desa (studi di desa kedok kecamatan turen kabupaten malang) dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa yang dilakukan pendamping desa ialah menyesuaikan dengan aturan yang telah dibuat oleh desa dimana strategi tersebut baik Musdes, RKPDes, RPJMDes dan APBDes yang merumuskan melibatkan masyarakat, aparat desa dan juga melibatkan pendamping desa untuk memberikan arahan yang sesuai dengan aturan. Dalam hal ini yang dirasakan oleh pendamping ialah pemerintah dalam memberikan aturan adanya pendamping dinilai kurang efektif

dikerenakan pendamping lokal desa dalam nyata 1 orang pendamping mendampingi 3 sampai 4 desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh mingkid jonathan yang berjudul efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan (suatu studi di desa watutumou dua kecamatan kalawat kabupaten minahasa utara) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di desa disebabkan pemerintah konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan segingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk membuat masyarakat desa sejahtera meluli dana desa untuk peningkatan pembangunan di desa watutumou dua, dengan melakukan integrasi, partisipasi dari masyarakat dan tradparansi yang ada di desa watutumou.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Pembangunan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

Efektifitas pengelolaan dana desa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan pembangunan di kecamatan lamasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik efektifitas pengelolaan dana desa maka akan semakin tinggi pemberdayaan pembangunan di kecamatan lamasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Efektifitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan pembangunan bertujuan untuk memudahkan desa dalam pemberdayaan pembangunan. Dengan adanya pengelolaan dana desa ini diharapkan desa mampu mengelola dana desa dengan baik juga transparan sehingga dapat berdampak pada pemberdayaan pembangunan desa. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti tentang efektifitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan pembangunan

DAFTAR RUJUKAN

Anon. 2020. "Jumlah Penduduk Di Sulawesi Mencapai 19 Juta Jiwa." 2020.

- Aryani, Ni Putu Dessy Eka, r. Desak Nym Sri Werastuti, and I. Made Pradana Adiputra. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa." *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 23(2):179–94.
- bilote noferly, Donly. 2020. "Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan 1) Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Saat Ini Dapat Dilihat Dari Kompetisi Global Dan Yang Bertolak Belakang D." 8(1):96–102. doi: 10.31289/publika.v8i2.4262.
- Dewi, Fitriani Sandra, and Sari Andayani. 2022. "Pembangunan Di Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)." 6(1):259–74.
- Fahri, Lutfhi Nur. 2014. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa." 75–88.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasution. 2018. "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." 10(1):146–54.
- Humaniora, Sosial Politik. 2017. "Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo." 5(1):126–40.
- Iskandar, J. (2016). *Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Puspaga.
- Istiqomah, Siti. 2015. "Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3(1):1–18.
- Maimunah, Sassi, Affifuddin, and Suyeno. 2021. "Pembangunan Desa (Studi Di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang) Jurusan Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Dinoyo , Kec Lowokwaru Kota Malang , 65144 , Jawa Timur Pendahuluan." 15(3):24–35.
- Mingkid jonathan, Gary, Daud Liando, and Jonhy Lengkong. 2017. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)." *Jurnal Eksekutif* 2(2).
- Neny, Oleh .:, Tri Indrianasari, Stie Widya, and Gama Lumajang. 2017. *PERAN Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangari Kecamatan Sukodono)*. Vol. 1.

- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Risna, Dewi. 2015. "Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Suwa Universitas Malikusaleh XIII*(3).
- Rochani, G. Y., S. Sudarmiani, and ... 2020. "Pengaruh Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Publik Di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." ... *Dan Inovasi Daerah* 2(2):59–65.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dab R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahdani, Reski. 2021. "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelohan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa." *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* 4(1):1–2.
- Widiyarta, Agus. 2018. "Efektifitas Tenaga Pendamping profesional Dalam Pemanfaatan Dana Desa Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 7(1). doi: 10.33005/jdg.v7i1.1198.